

MEWUJUDKAN DEMOKRASI INDONESIA SESUAI KEPRIBADIAN BANGSA DARI PRESPEKTIF STRATEGI PERANG SEMESTA

MAKING INDONESIAN DEMOCRACY ACCORDING TO THE PERSONALITY OF THE NATION FROM THE PRESPECTIVE OF THE TOTAL WAR STRATEGY

Agape Zacharia RD, Lukman Yudho Prakoso, Helda Risman

UNIVERSITAS PERTAHANAN

(agazd@ymail.com, lukman.prakoso@idu.ac.id, Rismancan@gmail.com)

Abstrak-Demokrasi yang diimplementasikan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia telah merefleksikan wajah demokrasi Pancasila, apakah sudah memberikan cerminan bagi wajah demokrasi Pancasila yang bercirikan permusyawaratan. Dari beberapa pilihan model Demokrasi dapat ditemukan strategi terbaik dan tepat yang dapat digunakan sebagai model demokrasi yang menerapkan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan menggunakan konsep teori strategi dan teori perang semesta, serta teori lainnya untuk saling memperkuat dari teori yang ada. Metodologi penelitian melalui studi pustaka untuk menelaah dan menganalisis data sekunder berkaitan masalah yang dibahas. Menjadi penting bahwa demokrasi di Indonesia tidak mencontoh dari negara manapun sesuai identitas dan kepribadian bangsa Indonesia.

Kata Kunci: strategi, perang semesta, demokrasi, pancasila, kepribadian

Abstract-Democracy that implemented in the life order of the state and nation of Indonesia has reflected the face of Pancasila democracy, which is characterized by deliberation. From several choices of democratic methods, it can be found that the best and right strategy can be used as a model of democracy that applies the principles of Pancasila. By using the concept of strategy theory, and total war theory, as well as other theories to evaluate each other from existing theories. Research methodology through literature study to examine and analyze secondary data that addresses the issues discussed. It is important that democracy in Indonesia does not emulate any country according to the identity and personality of the Indonesian people.

Keywords: strategy, total war, democracy, pancasila, personality

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, masih banyak mengalami tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Melihat kondisi ini ada kekhawatiran dari komponen bangsa lainnya yang peduli dengan kondisi ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum dapat mewujudkan mimpinya. Menuju cita-cita bangsa Indonesia yang

tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sisi lain dari realita kehidupan bahwa betapa besar potensi sumber

daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, namun hingga saat ini belum dikelola secara maksimal untuk kemakmuran rakyat. Realita kehidupan potensi sumber daya alam bangsa Indonesia dapat diilustrasikan sebagai suatu pemandangan yang menakjubkan ketika melihat pada satu sisi kantor yang memampangkan suatu peta Indonesia, yang menggambarkan suatu maha karya Tuhan Yang Maha Kuasa yang sedemikian besar kepada Bangsa Indonesia, akan potensi sumber daya alam, dimana panjang garis pantai 81.000 km dengan ± 17.854 pulau, laut seluas 5,8 juta km² yang merupakan 3 kali luas daratannya, 37% spesies dunia, pusat keanekaragaman tropis dunia dengan 79 jenis dari karang, 18% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau dunia, belum lagi kekayaan berupa mineral dan tambang, industri, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, hasil hutan dan lain sebagainya (Dorodjatun, 2014). Harta kekayaan alam bangsa Indonesia ini, pada sisi lain membuat masyarakat menjadi terlena, sehingga tidak dapat berbuat untuk kemakmuran bangsa.

Kita patut bersyukur dan bangga akan pemberian Tuhan bagi bangsa Indonesia. Melihat ini sepertinya bumi Indonesia inicurahan dari Surga, bahkan

mungkin tidak ada lagi negara yang mempunyai kekayaan alam seperti Indonesia didunia ini. Para ahli dibidang ekonomi berpendapat, pada tahun 80-an sampai dengan akhir tahun 90-an meramalkan bahwa bangsa Indonesia akan berkembang menjadi Singa Asia yang mengendalikan perekonomian maupun politik di kawasan Asia pada awal abad 21. Tetapi mengapa setelah memasuki abad 21 ramalan tersebut tidak menjadi kenyataan, bahkan terlihat perkembangan bangsa Indonesia semakin tertinggal dari negara tetangga dan lambat sekali berkembang serta semakin jauh dari ramalan tersebut.

Potensi sumber daya alam melimpah yang dimiliki bangsa Indonesia tersimpan potensi kerawanan yang besar, karena potensi sumber daya alam berada disetiap wilayah Kab, Kota dan Provinsi. Dan apabila anak bangsa tidak mengedepankan kepemimpinan nasional dalam penanganan eksplorasi dan atau pengelolaan potensi sumber daya alam tersebut, akan berdampak kepada kemungkinan terjadinya konflik vertikal yang berkepanjangan dan disintegrasi bangsa. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia sejak awal kemerdekaannya, menjadi negara yang utuh berdiri dibawah kepemimpinan the

founding fathers, tidak membuat bangsa-bangsa asing menyerah untuk mendapatkan kekayaan alam Indonesia. Terwujudnya kemerdekaan Indonesia, tak lepas dari peran para pemudanya beserta pemimpin nasional bangsa Indonesia. Presiden pertama republik Indonesia, Bung Karno telah membuktikan, dengan kecerdasannya, rasa nasionalismenya yang tinggi, hingga loyalitas kepada bangsanya, dapat mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang disegani oleh penduduk dunia.

Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Berlakunya konstitusi negara Indonesia bersumber dari rakyat atau kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Lembaga atau organisasi yang ada dalam negara sebagai pencerminan dari kepentingan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur sistem konstitusional dimana hukum dan konstitusi (constitutional democracy) menetapkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat mengikuti prosedur konstitusi. Prinsip-prinsip negara hukum sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat menjadi pertimbangan pokok. Karena pada prinsipnya dalam menyelenggarakan negara tidak berdasarkan lembaga ataupun paada

perorangan dengan kekuasaan tanpa batas, tetapi diatur dan disepakati oleh rakyat melalui wakil-wakilnya sebagaimana aturan konstitusi.

Demokrasi juga telah menjadi perhatian utama bagi negara-negara modern. Prinsip persamaan bagi setiap warga negara dalam berdemokrasi baik hak dan kedudukan dalam keikutsertaan pada pemerintahan. Oleh karena itu setiap warga negara tentunya memiliki kekuasaan yang sama bersumber dari legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Dalam perkembangannya, demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat secara sepenuhnya hanya mungkin terjadi pada negara yang wilayah dan jumlah warganya sangat kecil, seperti di negara kota (polis) pada masa Yunani (Moertono, 1988). Demokrasi dalam arti rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan sudah tidak mungkin dilaksanakan lagi. Jika dipaksakan, justru ada rakyat yang kehilangan kesempatan untuk ikut serta dalam pemerintahan. Menurut Robert A. Dahl menyatakan bahwa salah satu kegagalan demokrasi langsung yang terjadi pada masa Romawi di mana pada kenyataannya rakyat tidak mendapat kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam majelis warga di pusat

pemerintahan karena hal itu membutuhkan biaya dan waktu yang memberatkan (Rahman, 1999)

Hal ini melahirkan sistem demokrasi perwakilan yang bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap ditangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri dalam komunitas masyarakat dari berbagai bangsa di Indonesia.

Birokrat mendominasi di kalangan rakyat yang ditulis oleh James Burnham (Julius, 2017) bahwa dalam perekonomian diperlukan manajer yang sangat berperan dalam kelompoknya, untuk menjembatani hubungan yang baik diantara para manajer dan pejabat politik (Albrow, 1970). James juga membandingkan antara kekuasaan pada level manajer dengan level yang ada pada birokrat pada pemerintahan. Pada masyarakat yang berada di birokrat yang telah dilatih oleh birokrat senior, tentunya akan meneruskan atau mewariskan sikap-sikap birokrasi yang sudah ada. Mereka akan menjadi patuh

dan tunduk pada sikap dan nilai-nilai para birokrat termasuk budaya birokrasi yang dianggap berbelit-belit dalam urusan administrasi saja. Hal ini akan cepat menjerat masyarakat akan runtuhnya nilai-nilai demokrasi, sehingga ada suatu pertentangan dengan nilai-nilai tersebut yang dianggap sebagai suatu problem yang memerlukan pemecahan.

Hal yang perlu kita perhatikan tentang fenomena demokrasi di Indonesia adalah Pertama, masalah birokrasi dan hubungannya dengan demokrasi yang belum selaras. Kemenangan pada Pilkada bagi pejabat dari partai politik akan membawa nuansa dukungan untuk memilih pejabat yang menjadi tim suksesnya. Mendudukan seseorang pada jabatan tertentu dengan orientasi pada nilai-nilai untuk mendukung demokrasi maka persoalan birokrasi dan demokrasi belum dapat berjalan selaras. Cara pandang tentang demokrasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan sejalan dengan semakin kompleksnya hubungan antar warga. Kata demokrasi itu sendiri diambil dari bahasa Yunani, menurut bahasa Yunani, definisi demokrasi yang paling singkat adalah apa yang diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln di Gettysburg

Pensylvania pada tahun 1863 yaitu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”, oleh karena itu yang menjadi kata kunci dari demokrasi adalah bahwa rakyat memerintah atau melakukan pemerintahan oleh dirinya (Abidin, 2018), demokrasi mengandung dua dimensi kontes dan partisipasi yang menurut Robert Dahl (Dahl, 1994) merupakan hal menentukan bagi demokrasi. Kebebasan masyarakat dan politik yang terkandung dalam demokrasi dalam hal menyampaikan pendapat, berbicara, berserikat dan berkumpul yang sering ditampilkan pada saat-saat pesta demokrasi berlangsung dalam suasana kampanye pemilihan. Dalam (Samuel P. Huntington, 1995 : 6). Demokrasi berarti liberte, egalite, fraternite, dimana terdapat kontrol yang efektif dilakukan oleh warga negara terhadap kebijakan pemerintah.

David Held menyatakan terdapat tiga jenis tipe demokrasi. Pertama, demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi yaitu suatu sistem pengambilan keputusan mengenai problem publik dimana setiap warga negara dapat terlibat secara langsung. Tipe demokrasi ini terjadi di Athena kuno yang merupakan bentuk demokrasi pertama diperkenalkan. Kedua,

demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan, yang mana sistem pemerintahan mencakup pejabat-pejabat yang terpilih untuk melaksanakan tugas mewakili kepentingan-kepentingan atau pandangan dari kelompok di daerah-daerah yang terbatas untuk memberikan aspirasi dengan mengikuti aturan hukum yang ada. Ketiga, demokrasi yang berdasarkan atas jenis satu partai (Held, 2004). Mengamati model demokrasi oleh David Held, Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai problem demokrasi yang disesuaikan perilaku politikus dengan memperhatikan budaya politik dan ideologi yang kita anut. Seorang pengamat Indonesia Benedict R.O.G bahwa demokrasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya dan pandangan menurut kultur orang jawa. Prinsip ajaran budaya Jawa sangat mempengaruhi sistem politik dan prose demokrasi di Indonesia. Pada era orde baru dapat kita lihat bagaimana hubungan antara pejabat dengan bawahan ataupun elit politik dengan para warga negara seperti gusti dengan kawulo atau antara wong gede dan wong cilik. Bahwa sesungguhnya karakteristik utama dari sistem yang demokratis adalah kebebasan berbicara,

sistem pemilihan bebas, pengakuan terhadap *majority rule* dan *minority rights*, otoritas konstitusional dan kebebasan berbuat (Charles, 2001). Karakteristik ini sebagai gagasan yang diperkenalkan oleh Plato pada jaman klasik hingga jaman modern yang mana demokrasi sudah merupakan model pemerintahan yang ideal sampai saat ini. Meskipun upaya demokratisasi masih membutuhkan waktu yang cukup panjang bagi lembaga-lembaga politik, rezim yang memerintah, maupun nilai masyarakatnya sendiri dalam memaksimalkan upaya yang ada menuju iklim demokrasi yang diidam-idamkan.

Selanjutnya konstelasi sosial dan politik Indonesia tidak stabil. Meskipun demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang paling banyak dianut dan diadopsi di era kontemporer, beberapa pakar politik tetap menemui ancaman resistensi atasnya. Dalam hal ini, seperti dikatakan Samuel P. Huntington bahwa peradaban dari dunia lain bukan tertidur namun suatu waktu akan bangkit untuk merubah keadaan. Terdapat aliran fundamentalis yang kebanyakan orang dikaitkan dengan gerakan kelompok ekstrim penganut agama tertentu misalnya fundamentalisme Islam atau juga confusionisme China yang

kencenderungan tidak mau berkompromi dengan kelompok minoritas dan kontekstual terhadap ajarannya dapat menjadi ancaman terhadap sistem pemerintahan demokrasi. Begitupun menurut Francis Fukuyama (2006) bahwa eksistensi demokrasi akan menemui ancaman pada fundamentalisme agama. Secara tegas, dia memposisikan fundamentalisme Islam serta ortodoks Yahudi sebagai ancaman terhadap demokrasi. Menurutnya hal tersebut memperingatkan akan kedua pemahaman tersebut terkait dengan memiliki konstruksi atas sistem pemerintahannya sendiri. Melalui titik tolak yang berbeda dalam non-Ideologis yang dikemukakan Amartya Sen “melihat ancaman atas demokrasi hadir melalui taraf ekonomi rakyat yang belum mumpuni”, sehingga besar kemungkinan menyebabkan terjadinya money politic dalam proses demokrasi. Karena diharapkan demokrasi akan berjalan secara substansional namun hanya akan berada sekedar pada tataran prosedural. Perjalanan proses demokratisasi di Indonesia dapat dipetakan melalui : demokrasi di era Orde Lama; demokrasi di era Orde Baru; dan demokrasi di era reformasi (Periode 1999-sekarang).

Keberadaan demokrasi perwakilan (Pemilu) sebagai sarana pengembangan budaya demokrasi. Pemilihan umum dengan menggunakan sistem perwakilan proposional lebih demokratis dibandingkan dengan sistem distrik bahwa perwakilan proposional dapat meningkatkan prospek demokratisasi di masyarakat plural yang pilihan-pilihan politiknya sangat dalam dan mencerminkan pembagian etnis, rasial, lingustik atau agama (Barkan, 1996) merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pada dasarnya pemilihan umum bertujuan sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat sebagai yang berdaulat sehingga pemilu juga dapat diartikan sebagai mekanisme pendelegasian dan penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipilih, pemilu juga dapat dikatakan memindahkan konflik kepentingan di masyarakat dan dipindahkan kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta pemilu merupakan sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan untuk mendukung pemerintahan dengan cara

ikut serta dalam proses politik. Pemilu yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pemilihan umum tidak boleh menyebabkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi rusak.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum di Indonesia mengatur Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia berdasarkan sejarah telah melaksanakan Pemilu beberapa kali. Pada era reformasi semenjak pemilu langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung sampai dengan sekarang telah melaksanakan sebanyak 4 kali pemilu langsung. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia berkembang dari masa ke masa sejalan sesuai demokrasi dengan cara Indonesia. Beberapa kali Pemilu tersebut memberikan pengalaman

demokrasi yang penting dan juga menandai praktik demokrasi perwakilan di Indonesia yang dengan berbagai permasalahan dan jalan keluar mencari bentuk yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Adapun periodisasi Pemilu di Indonesia yaitu : 1) Pemilu pada Masa Orde Lama; 2) Pemilu pada Masa Orde Baru; dan 3) Pemilu pada Era Reformasi.

Dari ulasan praktek demokrasi di Indonesia diatas, maka perlu merumuskan pertanyaan dari judul penulisan diatas, yaitu apakah praktek demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan corak dan kepribadian bangsa Indonesia? dan bagaimana solusi pemecahannya. Dengan demikian ada hal-hal yang perlu dicermati dari rumusan masalah ini, bahwa untuk menjawab masalah tersebut harus mengembangkan beberapa persoalan. Pertama, persoalan birokrasi dan hubungannya dengan demokrasi; Kedua, persoalan konstelasi sosial dan politik Indonesia tidak bercorak dan kepribadian Indonesia; dan Ketiga, persoalan demokrasi perwakilan dalam Pemilu sebagai sarana pengembangan budaya demokrasi belum berjalan dengan baik dan sempurna atau belum demokratis.

Para ahli berpendapat bahwa prinsip-prinsip hidup bernegara seperti yang dirumuskan di dalam Pancasila (termasuk prinsip kerakyatan/demokrasi) telah lama dipraktekan dalam kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Dan ternyata pada masyarakat purba Nusantara sudah dikenal sistem hidup berkelompok yang demokratis. Tabiat sebagai corak hidup demokratis masyarakat Nusantara adalah corak hidup masyarakat tradisional dari berbagai kelompok masyarakat sebelum adanya konsep “bangsa” Indonesia. Konsep bangsa Indonesia baru lahir ketika pergerakan kemerdekaan dan tuntutan mendirikan negara Indonesia di atas wilayah jajahan Hindia Belanda bergelora.

Setelah masa kemerdekaan istilah yang sering dipakai untuk menyebut demokrasi adalah istilah kedaulatan rakyat. Pernyataan tentang demokrasi pernah dikemukakan oleh HOS Tjokrominoto pada tahun 1918 di depan Volksraad atau DPR yang dibentuk oleh kolonial Belanda. Demokrasi yang diinginkan Tjokrominoto adalah demokrasi dalam rangka Pluralisme yang harus memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi peranan rakyat untuk menentukan jalannya Negara.

Pemikiran senada juga pernah dikemukakan oleh Soekarno dan Hatta, dua tokoh yang kemudian memperoleh gelar Proklamator di Indonesia.

Soekarno dan Hatta pernah menyatakan penolakannya terhadap demokrasi liberal yang pluralisme seperti Eropa Barat, karena demokrasi liberal hanyalah sebagai demokrasi politik yang tertuju pada bidang sosial dan ekonomi dan tidak berpihak kepada kesejahteraan namun sebaliknya merugikan rakyat. Menurut Soepomo, bahwa negara merupakan bangsa yang teratur, persatuan rakyat yang tersusun sehingga di dalamnya tidak ada dualisme mengenai staat dan individu, tidak ada pertentangan antara staat dengan susunan hukum individu, sebab individu merupakan bagian organik dari negara, yang mempunyai kedudukan dan kewajiban tersendiri untuk turut menyelenggarakan kemajuan negara.

Permasalahan demokrasi bangsa Indonesia, hingga saat ini masih menimbulkan polemik yang berkepanjangan, dan dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan konflik internal bangsa yang mengarah kepada disintegrasi NKRI. Namun budaya demokrasi Indonesia cenderung nilai-nilai asal usul yang sangat menonjol bahwa

pemilih dipengaruhi oleh identitas dengan afiliasi agama, suku, wilayah, atau tingkat kelas sosial (Edward, 2010). Oleh karena itu, permasalahan demokrasi bangsa Indonesia yang belum menemui kerangka yang terbaik perlu pendekatan pemecahan persoalan (problem solving) melalui penelitian terhadap strategi perang semesta dalam optimalisasi Demokrasi Indonesia Sesuai Kepribadian Bangsa Indonesia.

Metode Penelitian.

Menurut Nazir (1988) Penelitian ini melalui studi pustaka untuk menelaah dan menganalisis bahan-bahan primer maupun bahan sekunder berkaitan masalah yang dibahas. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan/ library research yang menelaah terutama data sekunder diperoleh melalui hasil-hasil penelitian, focus group, buku-buku dan jurnal ilmiah, literatur, catatan-catatan dan laporan yang ada berkaitan dengan obyek penelitian yang diteliti. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, salah satunya dilakukan studi komparatif terhadap data sekunder dan menganalisis data sekunder tersebut yang digunakan metode analisis kualitatif dan analisis materi muatan.

Selanjutnya dengan empiris yang dilakukan yaitu menelaah data sekunder meliputi berbagai terapan teori. Dengan teknik pengumpulan data awal yang diperlukan pada penelitian ini dilakukan dengan melihat data sekunder dari informasi dari literatur kepustakaan yang dirangkum melalui forum diskusi grup sehingga dapat diperoleh data-data awal secara faktual sebagai bahan penting dalam memperkaya materi penelitian pada proses analisis. Sebagai analisis data dilakukan dengan menelaah data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan tertulis dari sumber data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder analisis kebijakan publik meliputi berbagai Teori tentang demokrasi dihadapkan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang bercirikan Demokrasi berdasarkan Pancasila dalam rangka menggali dan mengejawantahkan model demokrasi yang diinginkan. Hasil analisis dituangkan dalam langkah dan upaya mencari alternatif sebagai solusi tindakan selanjutnya kedepan.

Hasil dan Pembahasan

Dari perspektif perang semesta, mendefinisikan pendapat Von Clausewitz tentang strategi sebagai bentuk

engagements dari tujuan perang. Sehingga penjelasan dari definisi strategi tersebut selalu mengarah pada hubungan yang menggunakan antara kekuatan militer dan tujuan politik sebagai pedoman dalam mengaplikasikan kebijakan suatu negara. Militer dan politik boleh dikatakan dua sisi mata uang yang saling berhubungan. Militer selalu ada dalam politik, cara-cara militer selalu identik dengan penggunaan kekuatan, politik banyak menggunakan cara-cara militer sebagai strategi untuk memenangkan atau mencapai tujuan. Menurut Carl (1977) dalam *On War*, yang dijelaskan bahwa alat atau sarana merupakan suatu kekuatan militer untuk mencapai tujuan akhir dalam rangka mewujudkan tujuan politik suatu negara. Memperoleh tujuan yang ingin dicapai memerlukan suatu cara sebagai rencana yang tepat, yang mana rencana tersebut merupakan penjabaran suatu strategi untuk mencapai tujuan atau sasaran atau *Ends*, selanjutnya didukung oleh sarana atau *means*.

Pada Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004 tentang Pertahanan Negara yang berisikan bahwa Pertahanan Rakyat Semesta adalah sishanta adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga

negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Demokrasi selalu melibatkan seluruh rakyat untuk mewujudkan kemakmuran dan kemajuan bangsa, terutama saat melaksanakan pemilihan umum, baik rakyat yang berposisi yang dipilih atau yang memilih sehingga demokrasi merupakan salah satu bentuk perang semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Dengan demikian tokoh politik harus mengerahkan seluruh kekuatan yang ada agar tujuan politik dalam berdemokrasi dapat dicapai. Pada era internet yang merupakan penemuan terbesar dalam sejarah peradaban manusia yang memberikan banyak kemudahan sekaligus tantangan. Perang semesta dalam demokrasi sudah merambah ke dunia maya dengan memanfaatkan internet untuk mengantisipasi perkembangan politik tanah air. Semua sarana dimanfaatkan semaksimal mungkin karena demokrasi juga bersifat kesemestaan. Fenomena ini harus dicermati dengan bijaksana sehingga perubahan yang ada dalam kita berdemokrasi dapat membawa kemajuan bangsa. Namun apabila tidak dapat disikapi dengan baik akan membawa dampak negatif khususnya

bagi pertahanan negara (Putra, Supartono & D.A.R., 2018)

Para ahli juga mendefinisikan tentang pengertian demokrasi, yang dapat dijadikan acuan agar mudah memahaminya. Pendapat tersebut antara lainnya dikemukakan oleh Kranenburg bahwa demokrasi dibentuk dalam dua pokok kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan Kratein yang berarti memerintah sehingga bermakna adalah “cara memerintah oleh rakyat” Mukhlis (2018), adanya demokrasi karena ada partisipasi rakyat disana. Suara rakyat adalah suara Tuhan adalah ungkapan yang mengagungkan bagaimana posisi rakyat didalam membentuk demokrasi yang dapat diterima dan menghasilkan keputusan-keputusan yang harus dijunjung tinggi karena rakyat sebagai suara Tuhan (vox Dei Vox Populi).

Sejak bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dan memasuki era globalisasi secara bertahap menata identitas kepribadian bangsa yang berdemokratis. Seiring dengan perjalanan waktu pada masa sekarang ini bangsa-bangsa didunia bersiap untuk menghadapi tantangan yang sangat kuat, terutama karena pengaruh

kekuasaan dunia internasional yang mendominasi ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pergeseran pandangan terhadap masalah budaya dan karakter suatu bangsa. Ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempengaruhi karakter dan budaya suatu bangsa.

Menurut Berger dalam *The Capitalis Revolution*, era globalisasi dewasa ini ideologi kapitalis yang akan menguasai dunia (Subandy, 2014). Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, dan secara tidak langsung juga nasib, sosial, politik dan kebudayaan. Demikian juga dengan pendapat Fukuyama (Faozi, 2018), bahwa perubahan global ini membawa perubahan suatu ideologi, yaitu dari ideologi partikular kearah ideologi universal dan dalam kondisi seperti ini kapitalismelah yang akan menguasainya. Indonesia yang mengalami era industry dengan perkembangan teknologi informasi juga mengalami kekacauan masyarakat dengan melemahnya lembaga hukum beserta aturan-aturan hukumnya maupun juga melemahnya

budaya masyarakat yang selama ini sudah mengakar dikehidupan sehari-hari.

Fenomena Demokrasi di Indonesia.

Dalam menelaah Fenomena Demokrasi di Indonesia tentu saja kita harus memahami bahwa sistim demokrasi merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat. Bagi Indonesia pemilihan sistim pemerintahan yang demokratis merupakan perwujudan untuk meraih cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, walaupun dalam dinamika pelaksanaannya mengalami banyak tantangan.

Kenyataan bahwa kesadaran rakyat untuk berdemokrasi cukup besar, hal ini dapat terlihat dari partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Umum beberapa waktu lalu. Walaupun sempat terjadi permasalahan pada saat pelaksanaan Pemilu dan hasil hitung suara yang kontroversial, namun tidak terjadi chaos. Bahkan masing-masing calon Presiden Pemilu 2014 bersama-sama dengan Partai pendukungnya bersepakat untuk membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil putusan MK yang menetapkan bahwa suara Jokowi yang

unggul sebagai calon Presiden tidak menimbulkan dampak kerusuhan seperti yang diduga banyak pengamat, hanya konflik kecil yang terjadi pada saat pembacaan putusan sidang MK yang dilakukan oleh pendukung calon Presiden Prabowo, situasi dapat berhasil dikendalikan oleh aparat keamanan.

Sebenarnya budaya demokrasi telah lama berkembang di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang berada di pedesaan, dengan sering melakukan rembug desa, musyawarah adat dan pemutusan peraturan. Kebiasaan yang dilakukan ini menjadi kearifan lokal yang membuat daya tahan masyarakat cukup kuat dalam menghadapi perubahan. Tetapi budaya demokrasi yang ada di desa ini ternyata dalam kehidupan demokrasi modern cenderung diabaikan, dan lebih senang diambil cara-cara voting untuk mengambil keputusan.

Belum lagi persoalan pemilihan calon-calon pemimpin maupun calon-calon legislatif lebih banyak muncul calon-calon yang tidak cukup dikenal di wilayah pemilihan, tetapi tetap dicalonkan oleh Partai pendukungnya karena memiliki kekuatan uang. Disisi lain praktek transaksi politik sering dilakukan, sehingga banyak

menyebabkan Pimpinan Partai dan Kepala Daerah terjerat dengan kasus korupsi. Disamping itu juga sistem demokrasi yang dimiliki bangsa Indonesia mulai tergerus dengan sistem demokrasi liberal, yang tercermin dari banyaknya kebijakan ekonomi dan politik yang berorientasi pada kepentingan pasar dan negara-negara maju.

Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat, yang memiliki pengaruh dalam struktur dan sistem politik. Beberapa ahli menyetengahkan pandangan agar disatutemukan dengan pembahasan tentang struktur politik (political structure), karena hal itu berhubungan dengan fungsi konversi (conversion function) dan kapabilitas (capabilities system).

Fenomena demokrasi Indonesia, merupakan sesuatu hal yang menarik untuk ditelaah, karena model implementasi demokrasi tersebut disinyalir agak menyimpang jauh dari landasan teori demokrasi yang ada. Disamping itu juga, Indonesia merupakan marketing demokrasi, sehingga corak demokrasi dan kepribadian bangsa Indonesia tidak nampak.

Demikian pula dengan birokrasi pemerintah dan hubungannya dengan

demokrasi belum menyatu dalam kehidupan berorganisasi berbangsa dan bernegara, sedangkan konstelasi kehidupan sosial dan politik dari tiga periodisasi pemerintahan melahirkan berbagai ragam model demokrasi yang berpolemik hingga saat ini. Dan terakhir masih berkembang dengan wacana yang dihembuskan untuk jabatan presiden selama 3 periode, belum ada pedoman baku untuk menjaga kestabilan politik melalui demokrasi yang bercorak keindonesiaan.

Konstelasi Sosial dan Politik di Indonesia

Fenomena demokrasi yang terjadi di era orde lama yang mengalami Demokrasi pada periode 1945-1950, atau masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini memiliki kelemahan, karena demokrasi parlemen memberi peluang kepada partai-partai politik dan DPR untuk berkuasa dan mengabaikan persatuan dan kesatuan bangsa. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan

mufakat tidak dilaksanakan. Permasalahan tersebut disebabkan, karena pada periode pertama pemerintahan negara Indonesia adalah periode kemerdekaan. Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Selain itu bangsa Indonesia ingin mewujudkan beberapa komitmen persatuan dan kesatuan diantaranya : Pertama, political franchise yang menyeluruh. Para pembentuk negara, sudah sejak semula, mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi; Kedua, Presiden yang secara konstitusional memiliki peluang untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen; Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik di tanah air. Kesimpulannya, walaupun konstitusi yang digunakan adalah UUD 1945 yang presidensiil, namun dalam praktek kenegaraan sistem presidensiil tidak

dapat diwujudkan. Selanjutnya pada demokrasi periode 1950-1959, diterapkannya konstitusi UUDS tahun 1950. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, namun rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting). Sistem pemerintahannya liberal yang lebih menekankan pada hak-hak individual. Menghadapi tantangan fisik dalam bentuk gejolak pemberontakan di daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI (RMS, PRRI dan PERMESTA). Pada tahun 1955 merupakan Pemilu pertama semenjak Indonesia merdeka. Pemilu ini untuk memilih anggota konstituante yang bertugas membuat undang-undang yang tetap. Selama tahun 1956-1959 bersidang, konstituante ternyata tidak mampu menyusun UUD sebagaimana diharapkan. Pada demokrasi periode 1950-1959 adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Dan selanjutnya pada era orde lama terdapat demokrasi periode 1959-1966, sebagai masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya

peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik, semakin meluas. Kondisi kepemimpinan presiden tersebut ternyata dimanfaatkan oleh komunisme dengan PKI-nya untuk menyebarluaskan pengaruhnya. Buruknya penerapan kebijaksanaan politik, mendorong kemerosotan moral di sebagian masyarakat Indonesia yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, malah berusaha mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Periode ini berakhir dengan muncul Orde Baru menyusul kegagalan PKI merebut kekuasaan pemerintah. Sehingga Pancasila telah diarahkan sebagai ideologi otoriter, konfrontatif yang tidak memberi hak demokrasi.

Berakhirnya Orde Lama disusul dengan munculnya Orde Baru ditandai dengan surat perintah sebelas maret Fenomena Demokrasi Era Orde Baru kurun waktu 1966 sampai dengan 1998. Sebagai langkah pertama yang diambil oleh pemegang Supersemar adalah pembubaran PKI dan seluruh organisasi yang ada di bawah naungannya di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian oleh MPRS ideologi komunis dilarang di Indonesia sesuai TAP MPRS Nomor XXV/MPR/1966. Orde Baru berkehendak

ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Pada awalnya memang memberi udara segar dalam pengamalan Pancasila, namun beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata sering tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Orde Baru menciptakan slogan-slogan demi persatuan dan kesatuan, maka hak-hak demokrasi dikebiri sedikit demi sedikit. fungsi lembaga perwakilan lemah.

Kebebasan mendirikan organisasi partai politik dibatasi yang telah diatur pada pasal 28 UUD 1945. Masyarakat dituntut loyalitas tunggal pada Pancasila dan pemerintah. Aparatur negara yang melakukan korupsi tidak mendapat tindakan hukum yang memadai. Pelanggaran HAM banyak dilakukan oleh aparat pemerintah. Pemilu pelaksanaannya tidak demokratis, penuh dengan rekayasa untuk memenangkan Golongan Karya (Golkar) yang didukung kentalnya hubungan mesra antara Golkar dan militer (Suryadinata, 1992). Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Adalah bahwa Pancasila diarahkan menjadi ideologi yang menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah Golkar saat itu, demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang.

Saat ini kita menikmati era reformasi yang dimulai pada tahun 1999 sampai dengan sekarang. Mulai pada periode ini, TNI sudah meninggalkan politik praktis, Dwi Fungsi ABRI ditinggalkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada sipil untuk mengambil alih kepemimpinan nasional. redefinisi peran dan keterlibatan militer dalam konteks transisi demokrasi dapat mempengaruhi berhasil atau gagalnya proses demokratisasi itu sendiri. Fenomena terjadi di era reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Partai Politik yang bermunculan, banyak dengan tidak jelas ideologi Politik dan dengan banyaknya kepentingan yang tentunya saling berlawanan. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka

praktek demokrasi tatkala Pemilu berakhir melakukan apa yang menjadi janji-janji pada saat pemilu yang memang demikian.

Namun dalam pelaksanaannya setelah Pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara Presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan kata lain model demokrasi era reformasi dewasa ini, kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orde reformasi ingin memperbaiki kelemahan yang ada pada Orde Baru. Hak-hak untuk berdemokrasi rakyat dikembangkan. Dampaknya kebebasan rakyat menyuarkan aspirasinya. Rakyat bebas mendirikan partai politik, LSM, demokrasi, dan lain-lain. Begitu kebebasan pers mendapat tanda-tanda sudah lebih baik daripada masa Orba. Namun apa yang kita harapkan masih jauh dan memprihatinkan terhadap apa yang ditunjukkan para politisi dikala kebebasan berbicara, bersikap, bertindak lebih mudah diimplementasikan dengan menjunjung budaya dan santun seperti warisan nenek moyang, agar dapat memacu kreativitas masyarakat, namun di sisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme dan sentimen identitas

lebih mengemuka dengan benturan antar-suku, antar-umat beragama, antar-kelompok terjadi di berbagai daerah sampai pada saat ini. Pada pemilu terakhir untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang digelar pada 17 April 2019 menunjukkan suksesnya sistem demokrasi di Indonesia. Namun dalam prosesnya, para aktor yang mencalonkan diri untuk periode 2019-2024 mendorong mereka untuk memenangkan persaingan politik. Keinginan tersebut secara tidak langsung menimbulkan konflik terhadap masyarakat yang dipicu oleh perbedaan kepentingan masing-masing kelompok elit partai politik (Manik, Suhirwan & Prakoso, 2019).

Kepribadian Demokrasi Bangsa Indonesia sebagai Identitas nasional.

Pancasila sebagai falsafah pemersatu dan pedoman kehidupan elemen dari NKRI (Kartoli & Risman, 2020). Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda satu sama lain. Demikian Juga suatu bangsa, melalui kepribadian inilah setiap pribadi seseorang yang ada dalam suatu bangsa memiliki ciri khas masing-masing, begitu pula dengan sebuah negara. Setiap negara juga memiliki kepribadian masing-masing. Melalui kepribadian tersebut sebuah

negara dikenal luas. Kepribadian tersebut tidak akan lepas dari sejarah demokrasi yang menjadi ciri khas dari Indonesia itu sendiri yaitu Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila telah dibicarakan bahkan sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui pembacaan proklamasi oleh Ir. Soekarno dan Hatta.

Budaya demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan bersama sama menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Budaya demokrasi Pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuai dengan rumusan sila keempat Pancasila sebagai dasar filsafat Negara dan dasar politik Negara yang di dalamnya terkandung unsur kerakyatan, permusyawaratan, dan kedaulatan rakyat merupakan cita-cita dari demokrasi Pancasila.

Perilaku budaya demokrasi di Indonesia yang saat ini dipertontonkan di

media sosial dan media lainnya adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kurang Menjunjung tinggi perbedaan. Dimana budaya demokrasi mengajarkan bahwa, setiap manusia memiliki persamaan harkat dan derajat dari sumber yang sama sebagai makhluk ciptaan Yang Maha Esa. Namun prakteknya hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, para wakil rakyat kurang mampu membuat dan bertindak untuk menghargai orang lain sebagai wujud kesadaran diri untuk menerima keberagaman dalam masyarakat.
2. Kurang Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap manusia menerima fitrah hak asasi dari Tuhan Yang Maha Esa berupa hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Penerapan hak-hak tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak tanpa batas. Dalam kehidupan bermasyarakat, saat ini belum ada batas-batas yang harus di hormati bersama berupa hak-hak yang dimiliki orang lain, sehingga belum ada batasan normayang berlaku dan di patuhi. Selanjutnya juga kurang adanya upaya mewujudkan tatanan kehidupan

sehari-hari yang bertanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain perlu dengan sebaik-baiknya.

3. Belum Membudayakan sikap yang adil. Belum kelihatan adanya satu perbuatan mulia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari baik kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain dan belum mampu bersikap bijak dan adil. Bijak dan adil dalam makna yang sederhana adalah perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan perhitungan, mawas diri, mau memahami yang dilakukan orang lain dan proporsional. Masyarakat belum membudayakan dan mengembangkan budaya bijak dan adil dalam rangka mewujudkan kehidupan yang saling menghormati harkat dan martabat orang lain, masih ada diskriminatif, belum terbuka, dan kurang menjaga persatuan dan kesatuan lingkungan masyarakat sekitar.
4. Kurang membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Mengambil keputusan belum melalui musyawarah mufakat merupakan salah satu nilai dasar budaya bangsa Indonesia

yang sejak lama telah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam musyawarah mufakat terkandung makna bahwa pada setiap kesempatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan diperlukan kesadaran dan kearifan untuk memutuskan. Yang biasa terjadi sekarang sebelum suatu keputusan diterapkan tidak di dahului dengan dialog dan kurang mau mendengar dari berbagai pihak, juga kurang memahami terlebih dahulu persoalan-persoalan yang ada. Belum membiasakan membuat keputusan yang mampu memuaskan banyak pihak sehingga dapat terhindar dari konflik-konflik vertikal maupun horizontal.

5. Kurang mengutamakan persatuan dan kesatuan Bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kurang adanya sikap untuk lebih mengutamakan kepentingan orang lain/umum dari kepentingan pribadi yang sangat penting untuk di tumbuhkan. Kurang adanya Kesadaran setiap warga negara untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan merupakan wujud

cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara. Kita masih malas berfikir cerdas dan bekerja keras untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara melalui berbagai bidang kehidupan yang dapat kita lakukan. Makna penting dalam memahami sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan sudah banyak diabaikan, sehingga kita belum mampu berbuat tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa dan Negara, betapa pun yang kita lakukan adalah hal-hal kecil dalam status dan profesi yang kita miliki.

Kesimpulan

Demokrasi bukan sekedar alat teknis, melainkan juga cerminan alam kejiwaan, kepribadian, cita-cita nasional. Seperti apa yang pernah disampaikan dalam pandangan Soekarno bahwa jika demokrasi sekedar alat teknis, pada dasarnya tidaklah berbeda dengan sosialisme (fasisme), maupun diktator proletariat, yakni. sekedar alat untuk mencapai bentuk masyarakat yang dicitakan, entah masyarakat kapitalistis, sosialis, maupun yang lain. Tetapi di dalam cara pemikiran kita, atau lebih tegas lagi di dalam cara keyakinan dan

kepercayaan kita, kedaulatan rakyat bukan sekedar alat saja (Latif & Sutrisno, 2014). Kita berpikir dan berasa bukan sekedar hanya secara teknis, tetapi juga secara kejiwaan, secara psikologis nasional, secara kekeluargaan, sehingga dalam alam pikiran dan perasaan yang demikian itu maka demokrasi adalah satu bentuk kepercayaan dari masyarakat dalam usaha mencapai cita-cita yang menjadi idaman kita semua. Bahkan dalam segala perbuatan-perbuatan kita yang mengenal hidup bersama dan gotong rotong, kita selalu berlandaskan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, demokrasi yang kita namakan kedaulatan rakyat

Rekomendasi

Perilaku budaya demokrasi di Indonesia yang perlu di kembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai strategi demokrasi sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Menjunjung tinggi perbedaan. Budaya demokrasi mengajarkan bahwa, setiap manusia memiliki persamaan harkat dan derajat dari sumber yang sama sebagai makhluk ciptaan yang maha esa.

Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita mampu membuat dan bertindak untuk menghargai orang lain sebagai wujud kesadaran diri untuk menerima keberagaman dalam masyarakat. Menjunjung tinggi persamaan mengandung makna bahwa kita mau berbagi dan terbuka menerima perbedaan pendapat, kritik dan saran dari orang lain.

2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap manusia menerima fitrah hak asasi dari Tuhan Yang Maha Esa berupa hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Penerapan hak-hak tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak tanpa batas. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada batas-batas yang harus di hormati bersama berupa hak-hak yang dimiliki orang lain sehingga batasan normayang berlaku dan di patuhi. Untuk itu, dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan sehari-hariyang bertanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain perlu dengan sebaik-baiknya.

3. Membudayakan sikap yang adil. Salah satu perbuatan mulia yang dapat di wujudkan dalam kehidupan sehari-hari baik kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain adalah mampu bersikap bijak dan adil. Bijak dan adil dalam makna yang sederhana adalah perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan perhitungan, mawas diri, mau memahami yang dilakukan orang lain dan proporsional. Masyarakat kita perlu mengembangkan budaya bijak dan adil dalam rangka mewujudkan kehidupan yang saling menghormati harkat dan martabat orang lain, tidak diskriminatif, terbuka, dan menjaga persatuan dan kesatuan lingkungan masyarakat sekitar.
4. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat merupakan salah satu nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sejak lama telah dipraktekkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam musyawarah mufakat terkandung makna bahwa pada setiap kesempatan yang

berhubungan dengan pengambilan keputusan diperlukan kesadaran dan kearifan untuk memutuskan. Untuk itu, sebelum suatu keputusan diterapkan selalu di dahului dengan dialog dan mau mendengar dari berbagai pihak, juga selalu di upayakan untuk memahami terlebih dahulu persoalan-persoalan yang ada. Keputusan dengan musyawarah mufakat akan menghasilkan keputusan yang mampu memuaskan banyak pihak, sehingga dapat terhindar dari konflik-konflik vertikal maupun horizontal.

5. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sikap untuk lebih mengutamakan kepentingan orang lain/umum dari kepentingan pribadi yang sangat penting untuk di tumbuhkan. Kesadaran setiap warga negara untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan merupakan wujud cinta dan bangsa terhadap bangsa dan Negara. Kita harus mampu berfikir cerdas dan bekerja keras untuk kepentingan dan kemajuan

bangsa dan negara melalui berbagai bidang kehidupan yang dapat kita lakukan. Makna penting dalam memahami sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan adalah bagaimana kita mampu berbuat tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa dan negara, betapa pun yang kita lakukan meskipun hal-hal kecil dalam status dan profesi yang kita miliki.

Daftar Pustaka

- Abidin, S. Z. (2018). The Corruption in the Domain Democracy in Indonesia. *Transformasi Administrasi*, 3 (1), 439-455.
<http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/19>
- Albrow, M., & Albrow, M. (1970). Bureaucracy and the Theorists of Democracy. In *Bureaucracy*. https://doi.org/10.1007/978-1-349-00916-9_7
- Barkan, J. D. (1996). *Pemilu di Masyarakat Agraris*. https://www.google.com/search?q=pemilu+di+masyarakat+agraris+joel+D+barkan&safe=strict&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKkoos0T2KsTM87CGTiCO-By5WVA39Hg%3A16165141420&ei=XQxaYNWNGYH69QOgppHIBA&q=pemilu+di+masyarakat+agraris+joel+D+barkan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6E

- Carl von Clausewitz, *On War*. (1977). *C Theory*.
- Charles Kurzman. (2001). *wacana islam liberal pemikiran islam kontemporer tentang isu isu global - Penelusuran Google* (p. 126). Paramadina. https://www.google.com/search?q=wacana+islam+liberal+pemikiran+islam+kontemporer+tentang+isu+isu+global&safe=strict&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02ArxOBCT6B5WQpZzayyR1Zwnon7A%3A1616509911660&ei=1_tZYKXuJ5PbrQHS5r_gAg
- Dahl, R. A. (1994). *A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation*. *Political Science Quarterly*. <https://doi.org/10.2307/2151659>
- Dorodjatun Kuncoro-Jakti. (2014). *Surveying the future-contribution to Exonomic, Enviromental and Social Developmen*.
- Drs. Moertono. (1988). *Negara Modern* (terjemahan, p. 313). Bina Aksara.
- Edward Aspinall, M. M. (Ed.). (2010). *Problems of Democratisation in Indonesia*. ISEAS–Yusof Ishak Institute. <https://www.cambridge.org/core/books/problems-of-democratisation-in-indonesia/BFDA6979A8AB152A1CC147F1E3AC35AC>
- Faozi, S. (2018). *Hukum Modern ditengah Perubahan Sosial di Era Global*.
- Fukuyama, F. (2006). *The End of History and the Last Man*. Free Press. <https://sites.google.com/a/ipdn.ac.id/perpustakaan-ipdn/home/daftar-koleksi/buku-baru/the-end-of-history-and-the-last-man-by-francis-fukuyama>
- Held, D. D. (2004). *Demokrasi dan Tatanan Global : dari negara modern hingga pemerintahan kosmopolitan / David Held;penerjemah, Damanhuri*.
- Julius Krein. (2017). *James Burnham's Managerial Elite - American Affairs Journal*. 1(1). <https://americanaffairsjournal.org/2017/02/james-burnhams-managerial-elite/>
- Kartoli, K., & Risman, H. (2020). *Pemahaman Tren Saat Ini Sebagai Langkah Awal Penguatan Nilai-Nilai Pancasila*. *Mimbar Agama Budaya*, 1–7. <https://doi.org/10.15408/mimbar.v37i1.17825>
- Latif, Y., Haryatmoko, J., Nalle, V. I., Aryani, M. I., & Sutrisno, S. (2014). *Masih Perlukah Demokrasi Pancasila di Indonesia?: Prosiding Simposium Nasional Filsafat (IV: Surabaya, 8 Maret 2014)*. Fakultas Filsafat. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Manik, J. M., Suhirwan, S., & Prakoso, L. Y. (2019). *POST CONFLICT RESOLUTION OF THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION*. *Seminar Series in Humanities and Social Sciences*, 1.
- Mukhlis, M. M. (2018). *Tugas dan Fungsi Partai Politik sebagai Pengusung dan Pendukung Pasangan Calon Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang NO. 10 Tahun 2016*. Fakultas Hukum Unpas. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/35528>
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: *Ghalia Indonesia*.
- Putra, R. D., Supartono, S., & D.A.R., D. (2018). *Ancaman Siber Dalam Perspektif Pertahanan Negara*

(Studi Kasus Sistem Pertahanan Semesta). *Peperangan Asimetris*, 4(2).

<http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/view/255>

Rahman Zainuddin. (1999). *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat* (Terjemahan, pp. 18–19). Yayasan Obor Indonesia.

Subandy Ibrahim, B. A. (2014). *Komunikasi dan Komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika*.

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=bg1eDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR13&dq=Berger,+1988+politik+kebudayaan&ots=-Aecoy9f8q&sig=XoZg1pCWqZU25emg6QfcC_xZcNU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Suryadinata, L. (1992). *Golkar dan militer : studi tentang budaya politik* (A. E. Priyono (Ed.)). LP3ES (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial). <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=278701>